

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Tahun 2015

PT AVRIST ASSURANCE

I. PENDAHULUAN	1
II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	1
A. Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	1
B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham	41
C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/ atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat	42
D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat	43
E. Rasio gaji tertinggi dan terendah	43
F. Penerapan tata kelola investasi	44
G. Jumlah penyimpangan internal (<i>internal fraud</i>)	45
H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya	45
III. RENCANA TINDAK (<i>ACTION PLAN</i>)	47

I. PENDAHULUAN

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik PT Avrist Assurance tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/SEOJK.05/2014 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sebagai bagian dari Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pada bagian akhir laporan ini juga dilampirkan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2015.

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	Chartered Life Underwriter, Singapore College of Insurance Chartered Financial Consultant, Singapore College of Insurance	Sejak 1989	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-68/NB.1/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Presiden Direktur PT Avrist Assurance atas nama Perry Mahyudin Diah	6 Februari 2015	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Indonesia	Indonesia

2.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	Sarjana Ekonomi, Universitas Brawijaya Fellow Life Management Institute (FLMI), LOMA	Sejak tahun 1976	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-461/BL/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Adie Poernomo Widjaya	25 April 2013	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Indonesia	Indonesia
3.	Supardi Suparman	Direktur	Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti	Sejak 1989	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-215/BL/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Supardi Suparman	25 April 2013	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Indonesia	Indonesia
4.	Ibnu Hasyim	Direktur	Diploma III Bidang Ilmu Administrasi, Program Studi Aktuaria dan Perbankan, Konsentrasi Aktuaria Fellow of the Society of Actuaries of Indonesia (FSAI), Persatuan Aktuaris Indonesia	Sejak Tahun 2000	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-579/NB.1/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Ibnu Hasyim	1 November 2013	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Indonesia	Indonesia

5.	Isao Kubota	Direktur	Bachelor of Business and Commerce, Keio University	Sejak tahun 1989	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-461/NB.11/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direktur atas nama Isao Kubota	21 Agustus 2015	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Jepang	Indonesia
----	-------------	----------	--	------------------	--	-----------------	--	--------	-----------

1. Perry Mahyudin Diah - Presiden Direktur

Berbekal keyakinannya yang besar akan potensi asuransi di Indonesia, hingga kini Perry M. Diah telah mendedikasikan dirinya pada selama lebih dari 20 tahun di dunia asuransi jiwa. Saat ini, Perry M. Diah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Avrist Assurance.

Totalitasnya dalam menggeluti bidang asuransi juga didukung oleh latar belakang pendidikannya, Perry adalah lulusan Bachelor of Business Administration dari The College of Insurance serta memegang gelar CLU & ChFC dari Singapore College of Insurance. Selain itu, Perry juga memegang lisensi sebagai penasihat dari Dewan Investasi Indonesia.

Dedikasinya terhadap dunia asuransi jiwa telah mengantarkan beliau untuk mengikuti berbagai transformasi yang terjadi di Avrist. Tentunya berbagai perubahan tersebut diperuntukkan untuk lebih memacu pengembangan industri asuransi jiwa di Indonesia, serta menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

2. Adi Purnomo Wijaya - Wakil Presiden Direktur

Adi Purnomo Wijaya merupakan profesional yang sudah memiliki rekam jejak pengalaman lebih dari 39 tahun dalam industri jasa keuangan khususnya dibidang asuransi jiwa, juga salah satu pendiri Manulife Indonesia dan telah menjadi bagian dari perusahaan tersebut sejak didirikan pada tahun 1984 hingga tahun 2010 sebagai Vice President Director dan Chief Operating Officer. Aktif dalam beberapa jabatan organisasi kepengurusan Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta berperan aktif mewakili industri perasuransian dalam beberapa Kelompok Kerja sebagai mitra kerja regulator dalam pembahasan beberapa rancangan peraturan dan perundangan dibidang hukum, ketenaga kerjaan dan perpajakan. Bergabung dengan PT Avrist Assurance pada Januari 2011, pria kelahiran Blitar, 8 Maret 1950 ini kini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur.

Di Avrist, Adi bersama-sama dengan seluruh tim manajemen akan terus mengembangkan seluruh jalur distribusi perusahaan dalam memasarkan produk-produk asuransi jiwa guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan wealth protection dan wealth accumulation. Beliau juga berkomitmen untuk lebih membangun dan memajukan industri asuransi jiwa mengingat peran industri ini sebagai salah satu pilar dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya ini juga memegang sertifikasi *Fellow Life Management Institute* (FLMI) dari LOMA, sebelumnya pernah menjabat sebagai Vice President Director PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (1984-2010) dan sebagai Senior Manager PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya (1976-1984).

3. Ibnu Hasyim - Direktur Aktuaria & Produk

Ibnu Hasyim lahir di Jakarta, 15 Juni 1979. Pria lulusan Universitas Indonesia jurusan Aktuaria dan Perbankan, saat ini menjabat sebagai Direktur Aktuaria & Produk PT Avrist Assurance (2013-sekarang). Sebelum menjabat di posisi tersebut, Ibnu adalah Head of Actuary & ERM Avrist.

Sebelum bergabung dengan Avrist, Ibnu memiliki pengalaman sebagai Konsultan Aktuaria pada berbagai perusahaan multinasional, diantaranya PT Eldridge Gunaprima Solutions (2000-2007) dan PT Watson Wyatt Purbajaga (2003-2006). Ibnu juga memiliki pengalaman karir yang solid sebagai Aktuaria di berbagai perusahaan asuransi jiwa baik nasional maupun multinasional, antara lain PT Mandiri Life (2000-2002), PT Sun Life Financial Indonesia (2002-2003), AIA Indonesia (2003), PT Asuransi Jiwa Generali (2011-2012) dan Head of Actuary & Risk Management Avrist (2007-2011).

Ibnu juga telah mendapatkan sertifikasi sebagai Fellowship of Society of Atuary Indonesia (FSAI) di tahun 2003 dan ikut serta di berbagai seminar atau pelatihan baik sebagai peserta maupun pembicara.

4. Supardi Suparman - Direktur Keuangan

Supardi Suparman memiliki gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti. Saat ini Supardi menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Avrist Assurance. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai VP Comptroller, VP Admin dan Direktur selama masa jabatannya di Avrist. Selama lebih dari 21 tahun berkarir di PT Avrist Assurance, Supardi memiliki peran penting dalam proses perubahan dan perkembangan perusahaan.

Mengawali karirnya sebagai Audit Manager di KAP SGV - Utomo & Co (kini Ernst & Young), beliau telah mengikuti berbagai program pelatihan, diantaranya di bidang audit, perpajakan dan asuransi seperti Audit Management Conference, AIA Comptroller Conference, AIG Leadership Breakthrough di Hongkong & China, Pedoman GCG Perasuransian Indonesia.

5. Isao Kubota - Direktur Operasional

Isao Kubota telah berkecimpung di dunia asuransi, khususnya di Jepang, selama lebih dari 25 tahun.

Lulus dari program studi Business and Commerce Keio University - Jepang di tahun 1989, Isao Kubota langsung bergabung dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company (d/h The Yasuda Mutual Life Insurance Company). Sepanjang kariernya di Meiji Yasuda Life Insurance Company, beliau sempat memangku berbagai posisi, terakhir sebagai Group Manager Asia Business Development Group, International Business Department, dimana beliau bertugas untuk memimpin dan mengembangkan usaha asuransi jiwa di pasar Asia, termasuk usaha asuransi jiwa di Indonesia melalui PT Avrist Assurance. Sebelumnya, beliau juga dipercaya sebagai Managing Director untuk mengelola Meiji Yasuda Asia Limited (Hong Kong).

Isao Kubota resmi bergabung di Avrist sejak Agustus 2015 sebagai salah satu anggota Direksi perusahaan. Tanggung jawab pekerjaannya sebagai Direktur meliputi segala aspek dari Operasional Perusahaan.

Pada tahun 2015, terdapat perubahan susunan anggota Direksi, dimana susunan keanggotaan Direksi sebelumnya tampak dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
1.	Harry Harmain Diah	Presiden Direktur	25 April 2013	6 Februari 2015.
2.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	25 April 2013	Masih menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur.
3.	Supardi Suparman	Direktur	25 April 2013	Masih menjabat sebagai Direktur.
4.	Perry Mahyudin Diah	Direktur	25 April 2013	Terhitung sejak 6 Februari 2015 tidak lagi menjabat sebagai Direktur untuk kemudian diangkat sebagai Presiden Direktur.
5.	Ibnu Hasyim	Direktur	1 November 2013	Masih menjabat sebagai Direktur.

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Kepatutan				
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	Bachelor of Laws, University of Sydney	Sejak 1994	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-124/BL/2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Gregory Robert Scott Crichton	25 April 2013	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Australia	Hong Kong
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	Bachelor of Law, Aoyama Gakuin University	Sejak 1985	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1680/NB.1/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Kazunori Yamauchi	2 September 2014	Sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Jepang	Jepang
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	Master of Arts in Economics, Yale University	Sejak 1994	Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-66/BL/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Jannes Hutagalung	25 April 2013	3 tahun, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan di tahun 2016	Indonesia	Indonesia

1. Gregory Robert Scott Crichton - Presiden Komisaris

Selama lebih dari 25 tahun, Gregory Robert Scott Crichton pernah menjabat sebagai Penasehat Umum Regional pada American International Group dan Penasehat Umum pada American International Assurance, Co. Ltd.

Dalam masa jabatannya tersebut, beliau sempat menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Wakil Presiden Eksekutif dan dipromosikan sebagai anggota Dewan Direksi AIA pada tahun 1994, disamping juga menjabat sebagai anggota berbagai Dewan di AIG dan AIA. Beliau juga memiliki pengalaman bekerja pada Dewan Peninjauan Pendapatan Dalam Negeri Hong Kong dan lembaga lainnya.

Beliau merupakan sarjana hukum dari University of Sydney dan memiliki gelar Bachelor of Arts dari University of New South Wales. Beliau juga merupakan solicitor Mahkamah Agung Hong Kong di tahun 1995 dan solicitor Mahkamah Agung Inggris dan Wales. Greg Crichton ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Avrist Assurance pada tahun 2009.

2. Kazunori Yamauchi - Komisaris

Setelah menerima gelar Bachelor of Laws dari Aoyama Gakuin University, Tokyo, Jepang di tahun 1985, Kazunori Yamauchi langsung bergabung dengan Meiji Yasuda Life Insurance Company. Sejalan dengan kemitraan joint-venture Meiji Yasuda Life Insurance Company dengan PT Avrist Assurance sejak November 2010, Yamauchi menjabat posisi penting di PT Avrist Assurance sebagai anggota dari Dewan Komisaris.

Perjalanan karir Yamauchi selama 29 tahun di Meiji Yasuda Life Insurance Company meliputi berbagai posisi, yaitu sebagai Securities Analyst (1985), Representative (1993) di Sidney Office, Deputy Manager (1997), Investment Research di Investment Administration Dept., Manager (2000) di Asset Management Dept., Senior Account Executive (2005) di 1st Corporate Marketing Dept., General Manager (2007) di Planning Dept. Meiji Dresdner Asset Management Company, Staff General Manager (2009) di Capital & Surplus Management pada Corporate Planning & Research Dept., Staff General Manager (2010) di New Business Planning & Research pada Corporate Planning & Research Dept., Staff General Manager (2011) di International Business Dept., dan juga General Manager (2013 hingga kini) di International Business Dept. Sejak Juli 2014, Yamauchi menjabat sebagai Executive Officer & General Manager di International Business Dept.

3. Jannes Hutagalung - Komisaris Independen

Jannes Hutagalung adalah lulusan dari Universitas Indonesia dan Yale University, Amerika Serikat. Beliau kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Avrist Assurance setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Phillips-Ralin Electronics, PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Angkasapura II.

Jannes Hutagalung memegang beberapa jabatan penting di Kementerian Keuangan selama karir panjangnya di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputy Menteri untuk Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2008. Selain itu, beliau sempat bekerja selama 9 tahun di Bank Dunia, Washington DC, dimana Jannes Hutagalung juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif mewakili Grup Asia Tenggara dari tahun 1996 hingga tahun 2000.

Selama tahun 2015, tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Komisaris.

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Kriteria			Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Masa Jabatan	Kewarganegaraan	Domisili
			Pendidikan Formal Terakhir dan gelar profesi	Pengalaman Pekerjaan di bidang Perasuransian	Uji Kemampuan dan Keputusan				
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Magister Agama (MA) Institut Ilmu Al Qur'an Jakarta Dewan Syariah Nasional (SN-MUI) (bersertifikasi)	Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan Asuransi sejak tahun 2001	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-111/NB.1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Keputusan bagi Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Assurance atas nama Mursyidah Thahir	22 September 2014	4 tahun	Indonesia	Indonesia
2.	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Master in Syariah Economic Development , Universitas Kebangsaan Malaysia PhD in Syariah and Economic, Malaya University Malaysia	Sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Avrist Assurance sejak tahun 2005	Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-112/NB.1/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Keputusan bagi Dewan Pengawas Syariah PT Avrist Assurance atas nama Izzuddin Edi Siswanto	22 September 2014	4 tahun	Indonesia	Indonesia

Selama tahun 2015, tidak ada perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

b) tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Perseroan memiliki tugas pokok untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Direksi berkewajiban antara lain untuk:

- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- c. Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan;
- e. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
- f. Membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku;
- g. Menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menyerahkan kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit;
- h. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;
- i. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
- j. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perseroan serta Dokumen Perseroan lainnya;
- k. Memberikan Laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
- l. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan;
- m. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Para Pemegang Saham; dan
- n. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dewan Komisaris berkewajiban antara lain untuk:

- a. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan;
- b. Meneliti dan menelaah rencana kerja dan anggaran Perseroan yang disiapkan Direksi;
- c. Memberikan pendapat tentang rencana kerja dan anggaran Perseroan;
- d. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
- e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi penurunan kinerja Perseroan;
- f. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
- g. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
- h. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengusulkan akuntan publik kepada RUPS;
- j. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- k. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Dewan Komisaris bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas pokok untuk:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan pimpinan unit usaha syariah mengenai segala hal yang berkaitan dengan aspek syariah;
- b. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas segala produk/jasa dan kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; dan
- c. Bertindak sebagai mediator antara Perseroan dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, DPS wajib untuk senantiasa mengikuti fatwa DSN, merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN, dan melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

c) Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) Direksi

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	Komisaris	PT Bina Asetanusa	Perdagangan
			Komisaris	PT Bina Carya Haksara	Perdagangan Umum dan Jasa
			Komisaris Utama	PT Mecede Famaset	Jasa Konsultasi Manajemen
			Komisaris	PT Rismanindo Kreasi Lestari	Jasa Konsultasi Manajemen
2.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	--	--	--
3.	Supardi Suparman	Direktur	--	--	--
4.	Ibnu Hasyim	Direktur	Komisaris (menjalankan fungsi kepengawasan terhadap anak perusahaan)	PT Avrisc General Insurance	Asuransi Umum
5.	Isao Kubota	Direktur	--	--	--

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	Non-executive Director	Pico Far East Holdings Ltd.	Total Brand Activation
			Non-Executive Director	Pacific Harbour Asia Fund Limited	Fund Management Company
			Independent Non-Executive Director	QBE Emerging Markets Ltd.	General insurance.
2.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	--	--	--
3.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	<i>Executive Officer/General Manager, International Business Department (Business Execution Functions)</i>	Meiji Yasuda Life Insurance Company	Asuransi Jiwa
			<i>Director (fungsi pengawasan)</i>	Founder Meiji Yasuda Life Insurance Co., Ltd.	Asuransi Jiwa
			<i>Director (fungsi pengawasan)</i>	Meiji Yasuda America Incorporated	<i>Financial and economic research and customer development assistance in financing business</i>
			<i>Director (fungsi pengawasan)</i>	Meiji Yasuda Europe Limited	<i>Financial and economic research and customer development assistance in financing business</i>
			<i>Director (fungsi pengawasan)</i>	Meiji Yasuda Asia Limited	<i>Brokerage of insurance products, investment advisory, investment management, financial and economic research, customer development assistance in financing business</i>
			<i>Director (fungsi pengawasan)</i>	Meiji Yasuda Realty USA Incorporated	<i>Real estate investing business</i>

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Anggota DPS	PT Asuransi Tri Pakarta	Asuransi Umum
			Anggota DPS	PT AIA Financial	Asuransi Jiwa
2	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	--	--	--

d) Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan.

(1) Direksi

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta
			Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Tingkat 5	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	24 November 2015	Jakarta
2.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta
			Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Tingkat 5	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	24 November 2015	Jakarta
3.	Supardi Suparman	Direktur	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta
			Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Tingkat 5	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	1 September 2015	Jakarta
4.	Ibnu Hasyim	Direktur	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta
			Workshop Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian untuk pemenuhan Kualifikasi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian Tingkat 5	Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia	1 September 2015	Jakarta
5.	Isao Kubota	Direktur	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta

(2) Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta

(3) Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Workshop/training/seminar	Penyelenggara	Tanggal	Tempat
1.	Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Workshop Asuransi Syariah bagi Dewan Pengawas Syariah	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia bekerjasama dengan OJK dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia	25 – 26 November 2015	Jakarta
2.	H. Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	In-House Training mengenai Implementation of Good Corporate Governance in Insurance Industry	Indonesia Senior Executives Association (ISEA)	1 Oktober 2015	Jakarta

e) Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap Laporan Tahunan Perseroan untuk periode tahun 2014;
2. Meninjau dan memberikan masukan-masukan terhadap kinerja perusahaan dari sisi keuangan dan penjualan secara berkala melalui Rapat Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Mengadakan pembahasan di bulan Januari 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2014;
 - b. Mengadakan pembahasan di bulan Februari 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Januari;
 - c. Mengadakan Rapat Dewan Komisaris pada bulan Maret 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Maret;
 - d. Mengadakan pembahasan di bulan April 2015 dengan agenda utama pengesahan Laporan Tahunan 2014 mencakup Laporan Keuangan tahun 2014 yang telah di audit, serta tinjauan terhadap kinerja perusahaan di kuartal pertama tahun 2015;
 - e. Mengadakan pembahasan di bulan May 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan April;
 - f. Mengadakan pembahasan di bulan Juni 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Mei;
 - g. Mengadakan pembahasan di bulan Juli 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Juni;
 - h. Mengadakan pembahasan di bulan Agustus 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Juni;
 - i. Mengadakan pembahasan di bulan September 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus, serta pembahasan perkiraan pencapaian perusahaan di akhir tahun 2015 dan pengesahan rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2016;
 - j. Mengadakan pembahasan di bulan Oktober 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan September;
 - k. Mengadakan pembahasan di bulan November 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober; dan
 - l. Mengadakan pembahasan di bulan Desember 2015 dengan agenda utama tinjauan terhadap kinerja perusahaan di tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober dan November.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha Perseroan melalui Komite-Komite yang didirikan oleh Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi.

Selama tahun 2015, DPS Perusahaan telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat DPS dengan Perusahaan, dalam rapat dibahas mengenai update strategi, rencana dan program-program terkait Syariah.
2. DPS juga terlibat dalam proses pembuatan produk baru terutama untuk mengeluarkan opini/persetujuan terhadap Produk Syariah baru diperusahaan.
3. DPS bertanggung jawab untuk menyiapkan Laporan hasil Pengawasan DPS tahun 2014 yang dilaporkan kepada OJK pada bulan Maret 2015.
4. DPS juga berkewajiban memberikan Opini Kepatuhan Syariah atas Laporan Keuangan Audited Perusahaan, Laporan Keuangan Kuartalan selama 2015 dan Laporan Operasional Kuartalan 2015
5. DPS juga diikutsertakan dalam Program Pengembangan DPS yang diselenggarakan oleh AASI, DSN dan OJK.

f) frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun.

(1) Rapat Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Direksi (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	12		100%
2.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	12		100%
3.	Supardi Suparman	Direktur	12		100%
4.	Ibnu Hasyim	Direktur	12		100%
5.	Isao Kubota *)	Direktur	4		33%

*) Baru diangkat sebagai Direktur pada tanggal 21 Agustus 2015 dan menghadiri seluruh rapat Direksi sejak pengangkatannya.

(2) Rapat Dewan Komisaris

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris (12 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	4	8	100%
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	4	8	100%
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	4	8	100%

(3) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (6 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	4	2	100%
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	4	2	100%
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	4	2	100%
4.	Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	4	2	100%
5.	Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	4	2	100%
6.	Supardi Suparman	Direktur	4	2	100%
7.	Ibnu Hasyim	Direktur	4	2	100%
8.	Isao Kubota *)	Direktur	2	2	67%

*) Baru diangkat sebagai Direktur pada tanggal 21 Agustus 2015 dan menghadiri seluruh rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sejak pengangkatannya

(4) Rapat Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (19 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi/ Video Konferensi/ Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Hj. Mursyidah Thahir	Ketua Dewan Pengawas Syariah	19	--	100%
2.	Izzuddin Edi Siswanto	Anggota Dewan Pengawas Syariah	19	--	100%

(5) Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan Auditor Eksternal (1 kali rapat)		
			Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi / Video Konferensi/Sarana Media Elektronik lainnya	
1.	Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	1	--	100%
2.	Kazunori Yamauchi	Komisaris	1	--	100%
3.	Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	1	--	100%

2) Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan, terdiri atas:

a) pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

Secara umum setiap Department atau unit kerja memiliki pengendalian intern yang melekat dalam prosedur kerja yang dilaksanakan oleh masing-masing department. Kepala department bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur yang dilakukan oleh karyawan atau unit kerja yang berada dibawah supervisinya. Selanjutnya Internal Audit Department memiliki fungsi untuk melakukan review atas pelaksanaan prosedur dan penilaian atas pengendalian internal dari department yang akan di audit dan memberikan rekomendasi perbaikan bila ada penyimpangan maupun kelemahan prosedur.

b) pelaksanaan tugas komite yang menjalankan fungsi pengendalian intern Perusahaan.

(1) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Direksi, terdiri atas :

(i) struktur, keanggotaan, dan keahlian komite.

(a) komite investasi.

Komite Investasi merupakan salah satu komite manajemen perusahaan dimana Direktur yang membawahi Fungsi Investasi mendelegasikan kewenangan kepada Komite Investasi untuk melakukan pengawasan seluruh portfolio investasi perusahaan.

Rapat Komite Investasi dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Rapat dianggap memenuhi kuorum jika dihadiri oleh seluruh anggota Komite Investasi atau lebih dari 50% dari jumlah komite investasi.

Anggota Komite Investasi terdiri dari:

- (1) President Direktur yaitu Direktur perusahaan yang membawahi bidang Business Development, Marketing & Corporate Communication, and Investment
- (2) Direktur Actuary Perusahaan yaitu Direktur perusahaan yang membawahi bidang Actuary, Product Development, and ERM
- (3) Direktur Keuangan yaitu Direktur perusahaan yang membawahi bidang Finance & Accounting, General Service, and CSR
- (4) Independent Advisor & ERM Expert
- (5) Aktuaris Perusahaan
- (6) Kepala Fungsi Investasi yaitu Koordinator dan tenaga ahli perusahaan dalam bidang Investasi

(b) Komite Pengembangan Produk (*Product Development Committee*)

Dalam menjalankan fungsi pengendalian intern perusahaan khususnya untuk membuat sebuah produk baru maupun memodifikasi produk existing diskusi awal akan dilakukan di dalam forum PDC (*Product development Committee*) dimana keanggotaan PDC terbatas hanya pada jajaran BOD serta department head terkait.

Adapun diskusi dilakukan didalam PDC adalah membahas ide produk baru atau memodifikasi existing produk yang telah dituangkan oleh team product development dalam ringkasan produk beserta timeline nya, setelah ide tersebut di setujui oleh produk team selanjutnya ringkasan produk diberikan kepada bagian Aktuaria untuk dihitung (pricing) premi, VONB, cadangan dan cost nya. Setelah pricing dilakukan team Aktuaria, team PDC akan berdiskusi kembali mengenai produk tersebut, sekiranya produk tersebut mendapatkan persetujuan maka ringkasan produk akan kembali ke produk team untuk seterusnya memulai development produk tersebut bekerja sama dengan departemen lain yang tergabung dalam ad hoc PIC (*Product Implementation Committee*) sesuai dengan timeline yang telah disepakati PDC.

Adapun keanggotaan PDC beserta keahliannya antara lain adalah;

1. BOD : Memberikan pertimbangan, masukan dan persetujuan dilihat dari kepentingan perusahaan secara umum
2. Product Dept. Head : Memberikan ide bagi produk baru ataupun memodifikasi produk existing beserta analisa pesaing terhadap ide tersebut.
3. Operation Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi underwriting, claim dan POS perusahaan
4. Legal Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi keabsahan produk
5. Actuarial Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi perhitungan keuntungan perusahaan serta peraturan produk dari OJK
6. IT Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi kemampuan supporting system
7. Distribution Dept. Head : Memberikan pertimbangan dan masukan ditinjau dari segi penjualan dan kondisi pasar saat ini

(ii) tugas dan tanggung jawab komite.

(a) komite investasi:

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab Komite Investasi adalah sebagai berikut:

- (1) Mengevaluasi dan menyetujui Kebijakan Investasi perusahaan, termasuk kelas asset, alokasi asset dan batasan investasi.
- (2) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana/Strategi Investasi perusahaan, termasuk kelas asset dan rencana komposisi asset.
- (3) Mengevaluasi setiap penyimpangan investasi dan memonitor rencana tindak lanjutnya.
- (4) Mengevaluasi secara berkala Kebijakan Investasi dan Rencana/Strategi Investasi perusahaan dalam hal terjadi perubahan peraturan pemerintah mengenai investasi perusahaan asuransi, beserta memberikan rekomendasi dalam hal terdapat perubahan Kebijakan dan/atau Rencana/Strategi Investasi perusahaan.
- (5) Memonitor dan mengevaluasi kinerja portfolio investasi, termasuk kesesuaian antara durasi asset investasi dengan durasi kewajiban perusahaan, beserta perbandingan antara hasil kinerja investasi dengan tolak ukur (benchmark) maupun target imbal hasil yang telah ditentukan.
- (6) Mengevaluasi kondisi makro ekonomi dan pasar modal, baik domestic maupun global, serta pengaruhnya terhadap strategi investasi perusahaan.
- (7) Melakukan seleksi, menetapkan dan mengevaluasi secara berkala pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia jasa layanan (service providers) seperti bank rekanan, broker, bank custodian dan manager investasi.
- (8) Mengevaluasi dan memberikan persetujuan untuk penempatan kelas asset yang berkaitan dengan resiko kredit (obligasi korporasi).

(b) Komite Pengembangan Produk (*Product Development Committee*)

Dalam memastikan pengembangan pembuatan produk baru maupun modifikasi existing produk agar berjalan sesuai timeline yang disetujui, maka tugas dan tanggung jawab PDC dalam hal ini terkait dengan memberikan pertimbangan, masukan serta persetujuan atas feature produk dan hasil pricing yang diajukan oleh team product. selain itu PDC member juga bertanggung jawab atas ketepatan timeline yang harus di penuhi oleh masing-masing department yang di monitor dalam PIC.

(iii) frekuensi rapat komite.

(a) Rapat komite investasi.

No	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Investasi	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Bapak Perry M. Diah	7	100
2.	Bapak Ibnu Hasyim	7	100
3.	Bapak Supardi Suparman	7	100
4.	Bapak Manggi Habir	7	100
5.	Cunardi Tju	7	100
6.	Anna Leonita	7	100

(b) Rapat komite pengembangan produk

No	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Pengembangan Produk	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Perry M. Diah (BOD)	1	100
2.	Adi P. Wijaya (BOD)	1	100
3.	Supardi Suparman (BOD)	1	100
4.	Ibnu Hasyim (BOD, Operation, Product & Actuary)	1	100
5	Makki Kusuma (Legal)	1	100
6	Rudiman (Distribution)	1	100
7	Benny Iskandar (IT)	1	100

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

(a) komite investasi:

- (1) Pemberian persetujuan Komite Investasi atas Rencana/Strategi Investasi tahun 2015 perusahaan
- (2) Pemberian persetujuan Komite Investasi atas pembelian obligasi korporasi
- (3) Evaluasi Kinerja Investasi Perusahaan untuk 2Q dan 3Q dan keputusan untuk melakukan meeting setiap bulan di 3Q2015 dengan pertimbangan situasi market yang sangat fluktuatif
- (4) Pembahasan awal untuk penerapan Strategi Investasi tahun 2016

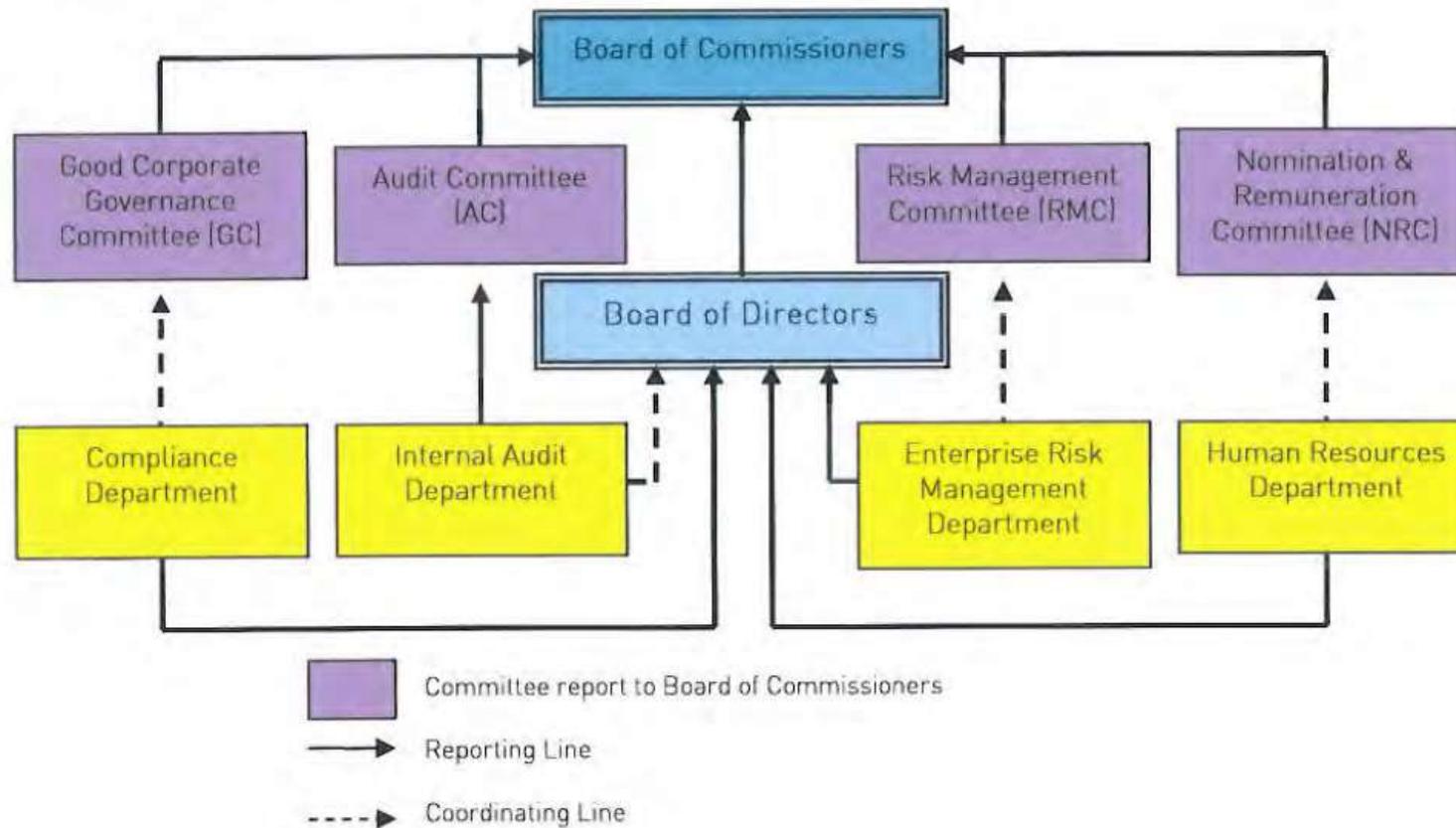
(b) Komite Pengembangan Produk (*Product Development Committee*)

Sepanjang tahun 2015 team product development memberikan beberapa design produk baru dan modifikasi existing produk ke PDC. Design produk yang disetujui oleh PDC dan dilaksanakan sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Hospital Solution – Avrist Sehati untuk agency dimana realisasi launching produk ini pada February 2015
2. Educational Product – Avrist PrimeGen untuk agency dimana realisasi launching produk ini pada Maret 2015
3. Modifikasi produk Term 10 untuk dijual di TeleMarketing dimana realisasinya produk ini di launching pada Maret 2015
4. Modifikasi produk Wealth Enhancer untuk bancassurance yaitu perubahan Crediting rate yang realisasinya terjadi di bulan Maret, Agustus dan Desember 2015
5. Beberapa modifikasi terkait dengan perbaikan feature produk AIP yang direalisasikan pada May 2015

- (2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri atas:
(i) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite.

Organization - Committee Reporting Structure



Keanggotaan, keahlian, dan independensi komite adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen, dengan anggota wakil presiden direktur dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang audit.
2. Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan adalah Komisaris Independen, dengan anggota wakil presiden direktur dan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang tata kelola.
3. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama dengan anggota komisaris, komisaris independen dan presiden direktur.
4. Ketua Komite Pemantau Resiko adalah Komisaris Utama dengan anggota komisaris, dan 2 orang pihak external yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

(ii) tugas dan tanggung jawab komite;

(a) Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan audit internal maupun audit independen dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor independen/eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan calon auditor independen/eksternal;
5. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan

(b) Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Melakukan penilaian risiko dan implikasi terhadap bisnis.
2. Mengawasi kecukupan sumberdaya yang memadai untuk melaksanakan kerangka kerja manajemen risiko, inisiatif/ program kerja khusus dan pengawasannya serta melakukan perbaikan dan rencana tindakan atas risiko yang terjadi.
3. Mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penyelesaian tugas manajemen risiko
4. Melaporkan potensi risiko dan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Meyerahkan laporan tahunan kepada dewan komisaris dan melaporkan kejadian risiko penting kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat.
6. Melakukan kegiatan yang terkait dengan manajemen risiko sesuai dengan arahan dari dewan komisaris.

(c) Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Merekomendasikan strategi remunerasi
2. Memberikan rekomendasi atas perencanaan suksesi.
3. Memberikan rekomendasi dan kriteria calon direksi dan komisaris sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
4. Merekomendasikan rencana remunerasi dengan memperhatikan kinerja perusahaan, imbal hasil investasi dan perbandingannya dengan industri yang sama.
5. Memberikan rekomendasi atas pengangkatan, pemberhentian, atau pensiun dari direksi dan komisaris kepada RUPS sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
6. Pengawasan atas pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehubungan dengan proses nominasi dan remunerasi.
7. Meyiapkan laporan tahunan kepada dewan komisaris dan melaporkan kejadian penting yang terkait dengan nominasi dan remunerasi kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat

(d) Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Tata Kelola Perusahaan antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan.
2. Melaporkan kejadian penting yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan serta rekomendasi perbaikan kepada dewan komisaris.
3. Menyiapkan laporan tahunan kepada dewan komisaris, termasuk laporan penilaian sendiri atas Tata Kelola Perusahaan serta melaporkan kejadian penting yang terkait tata kelola perusahaan kepada dewan komisaris secara cepat dan tepat.
4. Melakukan kegiatan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan arahan dari dewan komisaris.

(iii) frekuensi rapat komite

(a) Rapat Komite Audit

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Audit (12 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Jannes Hutagalung	12 kali	100%
2.	M.P. Sibarani	11 kali	92%
3.	Adi Purnomo Widjaya	11 kali	92%

(b) Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Pemantau Risiko (3 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Manggi Habir	3	100%
2.	Jannes Hutagalung	3	100%
3.	Masdar	2	66.67%
4.	Kazunori Yamauchi	3	100%

(c) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi (5 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Gregory Robert Scott Crichton	5	100
2.	Kazanori Yamauchi	5	100
3.	Jannes Hutagalung	5	100
4.	Perry Mahyudin Diah	4	80

(d) Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

No	Nama Anggota Komite	Jumlah Rapat Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Lainnya (4 kali rapat)	
		Jumlah Kehadiran	%
1.	Jannes Hutagalung	4	100
2.	M.P. Sibarani	3	75
3.	Adi Purnomo Widjaya	4	100

(iv) program kerja komite dan realisasinya.

1. Melakukan review atas kinerja Internal Audit sesuai dengan rencana audit tahunan yang sudah ditetapkan, dan membuat laporan kerja atas aktivitas yang dilakukan komite serta saran dan rekomendasi perbaikan atas temuan audit, termasuk memberikan rekomendasi untuk pemeliharaan external auditor.
2. Mereview dan memantau implementasi *Enterprise Risk Management*.
3. Mereview dan memantau *impact and probability assessment of risks*.
4. Mereview dan memantau implementasi dari strategi-strategi mitigasi risiko.
5. Mereview hasil *impact analysis of Stress-Testing*.
6. Mereview dan memantau risiko spesifik dari masing-masing *business line*.
7. Mereview dan memantau pengaruh risiko nilai tukar (*FX risk*) dan risiko suku bunga (*Interest rate risk*) pada portfolio perusahaan.
8. *Impact and probability assessment of risks (risk profiling)*
9. Hasil *impact analysis of Stress-Testing*
10. Operational Expenses Overrun, Investment risks, Financial markets volatility risk, Duration gap
11. Mengevaluasi dan membahas kinerja direksi
12. Melakukan review dan pengesahan atas laporan penilaian sendiri kuesioner tata kelola perusahaan, tindak lanjut atas penyelesaian Audit OJK dan revisi atas Pedoman Anti Pencucian Uang.

3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal.

a) Fungsi kepatuhan.

(1) adanya anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Avrist telah memiliki Compliance Department yang berfungsi untuk mengawasi kepatuhan bisnis unit terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan rekomendasi kepada manajemen dan bisnis unit terkait sehingga seluruh aktivitas bisnis selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Compliance Department bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Wakil Presiden Direktur.

(2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum.

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Per 31 Desember (Rupiah)	1.976.055.933.498	2.442.153.184.269	1.807.233.932.860	1.676.842.611.891	1.567.854.039.425

(3) tingkat kesehatan keuangan, antara lain tingkat solvabilitas, rasio likuiditas, dan rasio kecukupan investasi.

(i) Tingkat Solvabilitas untuk Perusahaan.

Tingkat Solvabilitas Per 31 Desember	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat solvabilitas Perusahaan	24.246.217.947	44.531.167.644	69.761.795.558	91.291.670.470	118.990.039.506
Dana Tabarru'	2.552.623.213	2.009.633.835	3.583.342.097	5.831.035.686	10.508.948.786
Dana Perusahaan	49.246.217.947	69.531.167.644	94.761.795.558	116.291.670.470	143.990.039.505

(ii) Rasio likuiditas untuk Perusahaan.

Rasio Likuiditas Per 31 Desember	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio likuiditas Perusahaan	6.691,98	9.200,09	58.124,49	7.199,91	9.229,19
Dana Tabarru'	139,99	156,56	336,91	700,02	647,43

(iii) Rasio kecukupan investasi untuk Perusahaan.

Rasio Kecukupan Investasi Per 31 Desember	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio kecukupan investasi Perusahaan	6.311,28	8.907,35	54.420,83	6.744,26	8.972,63
Dana Tabarru'	147,56	148,91	195,74	179,48	226,35

- (4) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

No	Aktivitas	Jumlah Laporan tahun 2015
1.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (<i>CTR</i>) kepada PPATK	-
2.	Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (<i>STR</i>) kepada PPATK	34
3.	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening keuangan terkait <i>CTR</i> dan <i>STR</i> dari: PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	-
4.	Permintaan <i>due diligence</i> AML/CFT dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-

- (5) Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen.

No.	Penanggung jawab	Pimpinan Unit Kerja/ Pelaksana Fungsi
1	Customer Care	Dr. Solaiman Arif

b) Fungsi auditor internal.

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- (1) ruang lingkup pekerjaan audit.

Melakukan pemeriksaan dan review internal control (operation dan financial audit) baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Pemas aran berdasarkan rencana audit tahunan yang di sahkan oleh Komite Audit.

- (2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal.

Independen department yang melapor langsung (garis lurus) kepada Komite Audit dan secara internal Perusahaan melapor (garis putus-putus/ dotted line) kepada President Direktur

- (3) Independensi auditor internal.

Dalam stuktur organisasi, kedudukan internal audit adalah independen karena melapor dan bertanggung jawab secara langsung kepada Komite Audit, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen dan bagian lain dari operasional perusahaan .

(4) uraian tugas satuan kerja.

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit untuk mengevaluasi efektivitas proses kerja yang ada di Perusahaan
- Membuat laporan audit yang meliputi identifikasi temuan, rekomendasi pengendalian dan kesimpulan yang menyeluruh serta melaporkannya kepada Manajemen
- Melaksanakan proses tindak lanjut atas temuan audit secara berkala dan menyampaikan laporan berkala tersebut kepada Direksi dan Komite Audit
- Ikut serta dalam proyek – proyek yang diadakan Perusahaan berdasarkan permintaan dari Direksi dan persetujuan dari Komite Audit
- Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada unit bisnis yang memerlukan untuk meningkatkan efektivitas dan tindakan perbaikan pengendalian internal dan operasional perusahaan.
- Melaporkan aktivitas audit internal kepada Direksi dan Komite Audit
- Membangun dan memelihara hubungan kerja yang baik dengan personel di unit kerja Perusahaan, Auditor Eksternal dan Organisasi lain yang relevan.

(5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal.

Per tgl. 31 Desember 2015 jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 4 pegawai.

(6) laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal.

Audit yang dilakukan di tahun 2015 sbb:

- Audit Agency Training & Development
- Audit Group Insurance – phase 1
- Audit Kantor Pemasaran Surabaya
- Audit Kantor Pemasaran – Jawa Tengah Area (Kantor Pemasaran Semarang, Yogyakarta & Solo)
- Audit Group Insurance – phase 2 (dalam proses)

c) Fungsi auditor eksternal

Auditor external telah melaksanakan tugasnya dengan efektif, perusahaan telah menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 6 tahun terakhir :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan)
2015	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Yasir
2014	KAP Purwantono, Suherman & Surja	Hermawan Setiadi
2013	KAP Purwantono, Suherman & Surja	Indrajuwana Komala Widjaja
2012	KAP Purwantono, Suherman & Surja	Hermawan Setiadi
2011	KAP Purwantono, Suherman & Surja	Hermawan Setiadi
2010	KAP Purwantono, Suherman & Surja	Hermawan Setiadi

4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

a) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Melakukan review, kaji ulang dan pengawasan terhadap implementasi strategi manajemen risiko.
- Memberikan rekomendasi berkaitan dengan alignment antara risk dengan strategi bisnis.
- Memastikan good corporate governance manajemen risiko berjalan dengan baik.
- Melakukan review, kaji ulang terhadap risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain.

b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

Kebijakan dan prosedur risk limit management dilaksanakan dengan terstruktur pada risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain.

c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilaksanakan dengan terstruktur dengan memperhatikan probabilitas risiko dan dampak risiko dari perspektif keuangan, solvabilitas (dari segi RBC), likuiditas, gangguan operasional, dampak kepatuhan terhadap regulasi dan dampak terhadap reputasi.

d) sistem informasi manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko dilaksanakan dengan terstruktur pada risiko-risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain.

e) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Sistem pengendalian intern dilaksanakan pada aspek-aspek risiko bisnis, strategi, operasional, keuangan, dan lain-lain, dengan memantau implementasi dari strategi mitigasi risiko.

5) Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

a) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

(1) remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, adalah berupa gaji, tunjangan hari raya dan bonus.

(2) fasilitas lain dalam bentuk natura/non naturayaitu penghasilan tidak tetap lainnya, adalah berupa asuransi kesehatan, transportasi dan fasilitas/ sarana telekomunikasi mobile phone.

b) Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun.

(1) paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan RUPS adalah berupa Gaji, THR, Bonus, Asuransi Kesehatan, Transportasi, dan Mobile Phone

(2) jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)	Orang	Jutaan (Rp)
1. Remunerasi (termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (<i>benefit</i>), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura)	5	18,309	3	2,954	2	208
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya).	5	2,563	3	418	-	-
Total	5	20,872	3	3,372	2	208

- (3) jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi perorang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp2 miliar	4	-	-
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	1	1	-
Di atas Rp500juta s.d Rp1 miliar	-	2	-
Rp500juta ke bawah	-	-	2

Keterangan:

*) yang diminta secara tunai

6) Rencana strategis Perusahaan.

- a) Rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana korporasi Perseroan mencakup rencana-rencana perusahaan di bidang investasi, pengembangan jalur distribusi dan pemasaran produk, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta pengembangan sistem teknologi informasi dalam perusahaan.

Kedepannya, Perseroan berharap dapat memberikan nilai yang optimal tidak hanya kepada para Pemegang Saham tetapi juga terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya. Melalui rangkaian kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh Perseroan baik saat ini maupun yang akan datang, masyarakat dapat mengumpulkan banyak manfaat, antara lain pengganti penghasilan, dana pendidikan bagi anak-anak, dana perawatan kesehatan dan kecelakaan, serta pengakumulasian dan pengembangan aset.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, Perseroan menargetkan untuk mendapatkan pencapaian Annualized Nett Premium (ANP) sebesar Rp 1,2 Trilyun, atau 3 (tiga) kali lipat dari proyeksi pencapaian ANP di tahun 2015. Dari sisi pendapatan bisnis baru, Perseroan juga menargetkan untuk melipat gandakan Value of New Business (VoNB) sampai dengan 3 (tiga) kali lipat dibandingkan proyeksi tahun 2015, atau sebesar Rp 492 Milyar. Untuk tahun 2019, Perseroan juga menargetkan untuk mendapatkan laba (setelah pajak) sebesar Rp 579 Milyar, atau 2 (dua) kali lipat dari proyeksi laba di tahun 2015.

b) Rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

Yang menjadi target jangka pendek dan menengah yang utama bagi Avrist tentunya adalah pertumbuhan modal, asset, premi, serta kesehatan keuangan yang akan bermuara pada semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan. Dengan keberhasilan Avrist dalam membukukan tingkat profitabilitas yang konsisten ditambah tingkat likuiditas perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban terhadap pemegang polis dan akan memungkinkan perusahaan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham dengan adanya tingkat pertumbuhan.

Sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, dapat diproyeksikan bahwa Perseroan akan memiliki kekayaan melebihi Rp 14 Trilyun dan ekuitas sebesar Rp 2 Trilyun. Penempatan investasi unit-linked diasumsikan proporsional mengikuti alokasi aset per September 2015 untuk tahun-tahun kedepan. Untuk non unit-linked, perusahaan masih akan melakukan penempatan secara signifikan pada surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta pada reksadana berpendapatan tetap. Diperkirakan bahwa selama 3 (tiga) tahun ke depan perusahaan akan tetap menjaga kestabilan arus kas dan memaksimalkan perolehan dari investasi. Dengan demikian perusahaan juga diproyeksikan akan mampu melakukan pembayaran kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis serta biaya-biaya lainnya tanpa harus menjual investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Dalam 3 (tiga) tahun ke depan, modal berbasis rasio yang dimiliki perusahaan masih akan dalam kondisi yang baik dan tidak memerlukan tambahan suntikan modal dari para pemegang saham perusahaan. Rasio likuiditas perusahaan juga masih sangat besar sehingga memberikan jaminan untuk pembayaran manfaat.

7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

Hasil pemeringkatan atas kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Fitch sebagai lembaga pemeringkat pada bulan November 2015 adalah “AA- Stable”. Rating tersebut telah dipertahankan oleh perusahaan sejak tahun 2012. Transparansi tentang produk produk asuransi Avrist dapat ditemukan dalam brosur, *leaflet* dan media promosi lainnya serta dalam *website* perusahaan. Setiap pengaduan nasabah dapat disampaikan melalui Call Center Avrist.

8) Fungsi Perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*).

No	Fungsi yang dialihdayakan kepada pihak lain	Pihak lain yang menjadi partner	Ijin usaha pihak lain yang dimaksud	Jangka waktu kontrak	alasan pemilihan pihak lain
1.	Administrasi	PT Karya Putra Surya Gemilang	Perusahaan Outsourcing	2 tahun	Pemborongan pekerjaan
2.	Driver, Office Boy	PT Solusindo Mitra Sejahtera	Perusahaan Outsourcing	2 tahun	Bukan merupakan posisi inti dalam bisnis proses

9) Pelaksanaan wewenang RUPS, terdiri atas:

a) Pelaksanaan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa serta keputusan yang dihasilkan pada masing-masing RUPS.

Pada tanggal 22 April 2015, Pemegang Saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana Pemegang Saham Perseroan telah memutuskan antara lain (i) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk periode tahun 2014, termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, (ii) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan tahun 2014 sebagaimana telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja, (iii) Menyetujui pembagian dividen kepada Para Pemegang Saham Perseroan, (iv) Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono Suherman & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2015, dan (v) Menyetujui pembebasan tanggung jawab (*ecquit et de charge*) bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh tindakan pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2014.

Para Pemegang Saham Perseroan juga mengambil keputusan pada tanggal 27 Oktober 2015 sehubungan dengan persetujuan dan ratifikasi rencana anggaran dan bisnis tahun 2016 Perseroan.

b) Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS.

Proses pengumuman dan pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi Perseroan kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Hal-hal lain yang masih menunggu persetujuan RUPS.

RUPS diharapkan untuk segera melakukan pengangkatan 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk Perseroan sehubungan dengan pemenuhan ketentuan jumlah minimum Komisaris Independen dalam perusahaan asuransi berdasarkan Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Adapun pengangkatan komisaris independen tersebut saat ini masih menunggu hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.

10) Pelaksanaan tugas Komisaris Independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan, dilakukan oleh komisaris independen dengan berbagai kegiatan melalui sarana rapat dewan komisaris, direksi dan rapat komite yang didalamnya terdapat komisaris independen sebagai ketua maupun sebagai anggota komite.

Tabel di bawah ini menggambarkan aktivitas komisaris independen dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas:

No.	Tanggal	Keterangan
Rapat Dewan Komisaris		
1.	30 Januari 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Desember 2014.
2.	25 Februari 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Januari 2015; 2. Kinerja/statistika industri di kuartal keempat tahun 2014; dan 3. <i>Key performance indicator</i> bagi anggota Direksi.
3.	31 Maret 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Maret 2015.
4.	22 April 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Tahunan 2014; 2. Kinerja perusahaan periode YTD – February 2015; dan 3. Proyek internal.
5.	29 Mei 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – April 2015.
6.	25 Juni 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Mei 2015.
7.	31 Juli 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Juni 2015.
8.	5 Agustus 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Juni 2015; 2. Proyek internal; 3. Penunjukan Direktur baru pada PT Avrist General Insurance; dan 4. Pembaharuan kalender tahunan.
9.	30 September 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Agustus 2015; 2. Estimasi pencapaian akhir tahun 2015; 3. Rencana kerja dan anggaran tahun 2016; 4. Kinerja PT Avrist General Insurance; dan 5. Piagam komite di bawah Dewan Komisaris.
10.	30 Oktober 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – September 2015.
11.	30 November 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan kinerja perusahaan periode YTD – Oktober 2015.
12.	8 Desember 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Kinerja perusahaan periode YTD – Oktober 2015; 2. Rencana kerja kanal distribusi di tahun 2015 dan 2016; 3. Hal-hal terkait Departemen Operasional; 4. Proyek internal; 5. Regulasi-regulasi baru di bidang perasuransian; dan 6. Kalender tahunan untuk tahun 2016

No.	Tanggal	Keterangan
Rapat Komite Audit		
1.	22 Januari 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Januari 2015 2. Follow up Open Audit Issues – status 31 Desember 2014 3. Internal Audit Plan 2015
2.	18 Februari 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Regulasi terkait Komite Audit 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Februari 2015
3.	26 Maret 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Proposal Penunjukan Akuntan Publik untuk Audit tahun buku 2015 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Maret 2015
4.	10 April 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – April 2015 2. Follow Up Open Audit Issues – status 31 Maret 2015 3. Persiapan Laporan Komite Audit untuk Rapat Dewan Komisaris
5.	19 Mei 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Update mengenai OJK Audit atas PT Avrist Assurance 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Mei 2015
6.	30 Juni 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Hasil temuan sementara OJK Audit atas PT Avrist Assurance 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Juni 2015
7.	28 Juli 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Juli 2015 2. Follow up Open Audit Issues – status 30 Juni 2015 3. Persiapan Laporan Komite Audit untuk Rapat Dewan Komisaris
8.	27 Agustus 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Hasil Audit OJK (final) atas PT Avrist Assurance 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Agustus 2015
9.	16 September 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Draft Audit Committee Charter 2. Aktivitas kerja tim Internal Audit – September 2015 3. Persiapan Laporan Komite Audit untuk Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Keterangan
10.	15 Oktober 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – Oktober 2015 2. Follow up Open Audit Issues – status 30 September 2015
11.	25 November 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Aktivitas kerja tim Internal Audit – November 2015 2. Persiapan Laporan Komte Audit untuk Rapat Dewan Komisaris
12.	23 Desember 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan aktivitas kerja tim Internal Audit – Desember 2015.
Rapat Komite Pemantauan Risiko		
1.	21 April 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Risk Assessment & Implementasi ERM. 2. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) per Mar 2015 3. Hasil impact analysis of Stress-Testing per Dec 2014 4. Operational Expenses Overrun 5. Invesment risks
2.	1 Oktober 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) 2. Hasil impact analysis of Stress-Testing per Jun 2015 3. Financial markets volatility risk 4. Duration gap
3.	7 Desember 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Impact and probability assessment of risks (risk profiling) per Oct 2015 2. Operational risk review and Profitability analysis 3. OJK regulation regarding risk profiling 4. Financial markets volatility risk 5. Duration gap
Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan		
1.	18 Februari 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan Self Assessment GCG 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan AML berupa rekapitulasi jumlah transaksi yang berpotensi mencurigakan. 3. Terjemahan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam Bahasa Inggris 4. Laporan Komisaris Independen tahun 2104

No.	Tanggal	Keterangan
2.	26 Agustus 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Final telah diterbitkan Oleh OJK 2. Action plan yang dari tim Compliance, Legal Corp Sec dan Internal Audit untuk menyelesaikan temuan Audit OJK.
3.	16 September 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. revisi atas AML Guideline Avrist sebagai penyesuaian dari PERKA PPATK 02/2015 2. Evaluasi action plan atas Laporan Hasil pemeriksaan OJK 3. Informasi mengenai pembuatan <i>Board manual</i> yang detailnya akan di review pada meeting selanjutnya.
4.	25 November 2015	Melakukan pembahasan, antara lain sehubungan dengan: 1. Laporan bahwa temuan atas Laporan Hasil pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan Surat kepada OJK tanggal 10 November 2015. 2. Review mengenai detail dari Board manual.
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
1.	24 Februari 2015	Melakukan pembahasan mengenai KPI dari Dewan Direksi
2.	3 Maret 2015	Melakukan pembahasan mengenai paket remunerasi Direktur baru
3.	21 April 2015	Melakukan pembahasan mengenai : 1. KPI dari Dewan Direksi 2. Kompensasi Dewan Direksi 3. Area & uraian jabatan dari Direktur baru
4.	3 Mei 2015	Melakukan pembahasan mengenai remunerasi Dewan Direksi
5.	22 Mei 2015	Melakukan pembahasan mengenai KPI Direktur baru

- 11) Hubungan kerjasama Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dengan perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi, antara lain nama agen, jumlah agen, kepemilikan sertifikat keagenan, dan perjanjian kerjasama keagenan.

PT Avrist Assurance tidak bekerja sama dengan perusahaan agen asuransi. Dalam memasarkan produk asuransinya melalui agency, seluruh agen tersebut terdaftar di asosiasi terkait dibawah naungan PT Avrist Assurance. Pada posisi 31 Desember 2015 Avrist mempunyai 5.029 agen asuransi jiwa, sudah termasuk 2.091 agen asuransi jiwa syariah. Seluruh agen tersebut memiliki setifikat keagenan yang masih berlaku dari asosiasi terkait yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Setiap agen tersebut sebagai individu telah menandatangani perjanjian kerjasama keagenan dengan PT Avrist Assurance.

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

Nama	Jabatan	kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor								
		A		B		C		D		Keterangan: Indonesia/ Luar Negeri
		Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Nominal Saham	Persentase Kepemilikan	
Perry Mahyudin Diah	Presiden Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	340,000,000,-	10%	Indonesia
		NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	200,000,000,-	10%	Indonesia
Adie Poernomo Widjaya	Wakil Presiden Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Supardi Suparman	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Ibnu Hasyim	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Isao Kubota	Direktur	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Gregory Robert Scott Crichton	Presiden Komisaris	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Kazunori Yamauchi	Komisaris	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Jannes Hutagalung	Komisaris Independen	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. perusahaan perasuransian lain;
- C. perusahaan jasa keuangan selain perusahaan perasuransian; dan
- D. perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
Perry Mahyudin Diah		√			√			√		√		Sebagai pemilik 10% saham dalam PT Bina Asetanusa dan PT Bina Dana Hahade
Adie Poernomo Widjaya		√			√			√			√	
Supardi Suparman		√			√			√			√	
Ibnu Hasyim		√			√			√			√	
Isao Kubota		√			√			√			√	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Direksi Lainnya			Dewan Komisaris			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**
Perry Mahyudin Diah		√			√			√			√	
Adie Poernomo Widjaya		√			√			√			√	
Supardi Suparman		√			√			√			√	
Ibnu Hasyim		√			√			√			√	
Isao Kubota		√			√			√			√	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

Nama	Hubungan Keuangan Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*	Ya	Tidak	Keterangan*
Gregory Robert Scott Crichton		√			√			√			√	
Kazunori Yamauchi		√			√			√			√	
Jannes Hutagalung		√			√			√			√	

Nama	Hubungan Keluarga Dengan											
	Dewan Komisaris Lainnya			Direksi			Dewan Pengawas Syariah			Pemegang Saham		
	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**	Ya	Tidak	Keterangan**
Gregory Robert Scott Crichton		√			√			√			√	
Kazunori Yamauchi		√			√			√			√	
Jannes Hutagalung		√			√			√			√	

Keterangan:

*) Bentuk hubungan keuangan: hutang-piutang, kerjasama bisnis, dsb.

***) Bentuk hubungan keluarga: suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar,dsb.

E. Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

Rasio	Skala Perbandingan
rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	100.2
rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	3.0
rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.3
rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3.5

F. Penerapan tata kelola investasi, terdiri atas:

1) Kebijakan dan strategi investasi.

Kebijakan dan Strategi Investasi untuk aset perusahaan asuransi Avrist Assurance mengacu kepada kebijakan investasi perusahaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2012 dan Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014. Kebijakan dan Strategi Investasi untuk unit bisnis Syariah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 dan Peraturan OJK No. 2/POJK.5/2014.

Kebijakan Investasi disusun dan disetujui oleh Komite Investasi perusahaan, dan direview secara ad-hoc basis jika terjadi perubahan peraturan dan perubahan lain yang mengakibatkan Kebijakan Investasi yang ada menjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana/Strategi Investasi disusun minimum setahun sekali dan di-review secara berkala untuk memastikan implementasi strategi investasi sudah sesuai dengan Rencana/Strategi Investasi yang telah disusun dan disetujui oleh Komite Investasi.

2) Pengelolaan investasi, yaitu penerapan analisis terhadap risiko-risiko investasi.

Pengelolaan investasi mengacu pada resiko-resiko investasi yang telah dijabarkan dalam kebijakan investasi, dan pengawasan secara berkala juga dilakukan terhadap kesesuaian antara durasi aset investasi dengan durasi kewajiban perusahaan kepada pemegang polis.

3) Pengalihdayaan investasi kepada pihak lain.

Untuk optimasi investasi Avrist juga melakukan pengalihdayaan investasi kepada pihak lain, yaitu PT. Bahana TCW Investment Management dan PT. BNP Paribas Investment Partner

G. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Penyimpangan internal dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total penyimpangan	-	-	-	-	-	1
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Selama tahun 2015 terdapat 1 penyimpangan yang tidak material yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap dan telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perusahaan.

H. Pengungkapan hal-hal penting lainnya:

- 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal
Tidak ada pengundiran diri ataupun pemberhentian auditor external selama tahun 2015.
- 2) transaksi material dengan pihak terkait;

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	Sifat dari hubungan	Transaksi yang signifikan/
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Avrist (dahulu/ DPLK AIA (“DPLK Avrist”))	Manajemen kunci yang sama/	Jasa administrasi investasi
PT Avrist General Insurance (dahulu/ PT Asuransi Starlite International)	Pemegang saham utama yang sama	Transaksi asuransi umum
Dana Pensiun Pemberi Kerja Avrist (dahulu/ DPPK AIA (“DPPK Avrist”))	Manajemen kunci yang sama	Jasa administrasi investasi
PT Bina Dana Hahade	Pemegang saham Perusahaan	Investasi pada anak perusahaan
Meiji Yasuda Life Insurance Company	Pemegang saham Perusahaan	Investasi pada anak perusahaan

3) klaim asuransi yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan yang nilainya sebesar 10% atau lebih dari modal sendiri Perusahaan.

No	Lini Usaha	Objek Pertanggung	Nilai Klaim	Retensi Sendiri	Keterangan
	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Selama tahun 2015 tidak terdapat klaim asuransi oleh perorangan ataupun perusahaan yang nilainya lebih dari 10% dari modal sendiri perusahaan.

4) benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>	<i>NIHIL</i>

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2015 tidak terdapat benturan kepentingan yang telah/ sedang atau yang mungkin akan terjadi.

- 5) informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

Permasalahan hukum.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap: a. Perdata b. Pidana	-- --	-- --
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus : a. Perdata b. Pidana	2 --	-- --
Total	2	--

III. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

No	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.	Penyesuaian jumlah komisaris independen yang paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan merupakan komisaris Independen. Pada tanggal 28 Januari 2016 Calon komisaris independen telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada OJK.	OJK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan komisaris independen pada tanggal 28 Januari 2016. Setelah menerima hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, maka selanjutnya akan dilakukan RUPS untuk mengangkat komisaris independen tersebut.	Selama tahun 2015 perusahaan telah melakukan upaya terbaik untuk mendapatkan komisaris independen, namun mengingat keterbatasan sumber daya komisaris independen sehingga perusahaan menghadapi kendala dalam mendapatkan komisaris independen yang tepat bagi perusahaan.	Komisaris independen yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK akan segera diangkat dalam RUPS.

